

**LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui realitas pendapatan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi dan membantu Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur selama satu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar Generasi

Untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan dan belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas,
- (e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus / Defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa Lebih / Kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan assetnya dalam

asset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Laporan Operasional

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka disusunlah Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penyusunan Laporan Operasional, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN / Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah Pusat dan Daerah antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- e. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900 / 010567 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan-Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900 / 010567 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, maka sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.1.1 Aset
 - 5.1.2 Kewajiban
 - 5.1.3 Ekuitas Dana
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1 Pendapatan
 - 5.2.2 Belanja
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Kinerja Perekonomian nasional dari tahun ke tahun yang semakin mantap dan terkendali merupakan indikator positif bagi perkembangan perekonomian nasional selanjutnya.

Perbaikan perekonomian nasional yang telah tercapai ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro dan moneter, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Cadangan Devisa, Nilai Tukar rupiah, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan kinerja ekspor.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam tiga bidang utama yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya pemerintahan dan bidang fisik infrastruktur. Sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Bidang ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka mendukung program pembangunan yang dilandasi Tri Sakti Bung Karno dan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan.

Bidang sosial budaya dan pemerintahan ditujukan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi, pengembangan pola karier yang terbuka, sinkronisasi dan harmonisasi hubungan dan regulasi antara provinsi dan kabupaten/kota, memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi; pemantapan kondusivitas wilayah; serta pengembangan demokratisasi dan wawasan kebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Dengan visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah “Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Unggul”, perlu melakukan penataan diri baik dari segi sistem, personil maupun pelayanannya untuk dapat mewujudkan PNS yang profesional, bermoral, netral serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana amanat undang-undang.

Untuk mewujudkan visi serta memantapkan eksistensi dan arah perjuangan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan.
2. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur.
3. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja.
4. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai.
5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi.
6. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi;
2. Meningkatnya kinerja aparatur yang akuntabel;
3. Terwujudnya penerapan penghasilan berdasarkan kinerja;
4. Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
5. Meningkatnya jaringan sistem informasi kepegawaian lingkup Provinsi Jawa Tengah;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan manajemen kepegawaian yang terintegrasi dan terpadu;
7. Meningkatnya moral dan etika PNS dalam bekerja;
8. Menurunnya jumlah kasus kedisiplinan;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan pegawai di bidang kesehatan jasmani dan rohani;
10. Meningkatnya produktivitas dan kinerja pegawai.

Guna tercapainya visi misi yang telah ditetapkan maka pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah dijabarkan dalam program-program setiap tahunnya, adapun program – program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014, yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Penyelenggaraan Kepegawaian Dan Perangkat Daerah

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sumber pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2014 yaitu dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan target Rp 7.753.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.574.289.000,- atau menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pendapatan adalah sebesar 59 % dari yang ditargetkan, hal ini disebabkan :

- a. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Pengadaan CPNS untuk Formasi Umum Tahun 2014, yaitu:
 - Peserta Seleksi dengan Sistem CAT (*Computer Assisted Test*) dengan target 200.000 peserta yang memenuhi syarat namun hanya 80.732 peserta yang memenuhi syarat.
 - Kabupaten/Kota yang mendapatkan formasi tidak semuanya mengikuti fasilitasi ke BKD Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut menyebabkan target pendapatan dari Fasilitas Umum untuk Seleksi sebesar Rp 4.000.000.000,- hanya dapat terealisasi sebesar Rp 1.614.540.000,- atau sebesar 40,36 %.

- b. Penetapan NIP untuk CPNS formasi Tahun 2014 yang diharapkan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebanyak 30.000 formasi namun hanya mendapatkan 1.412 formasi dan tidak semua Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan formasi. Karena pengadaan CPNS formasi Umum Tahun 2014 baru selesai dilaksanakan pada Desember 2014 maka Penetapan NIP-nya baru diproses/dilaksanakan pada Tahun 2015. Sedangkan penerimaan dari Penetapan NIP sebesar Rp 926.280.000,- atau sebesar 49,80% dari target sebesar Rp 1.860.000.000,- merupakan Penetapan NIP Formasi K2 sebanyak 15.192 formasi.
- c. Tes Kompetensi Pejabat Struktural Kabupaten/Kota atau *Position Competencies Assesment Program* (PCAP) yang direncanakan sebanyak 18 batch, terealisasi sebanyak 16 batch. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22/5992/SJ Tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 821/011585 tanggal 21 November 2014 dimana untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi dilakukan melalui konsultasi kepada Gubernur melainkan melalui metode seleksi secara terbuka. Sehingga ada 2 (dua) Kab/Kota yang telah mendaftar Fasilitasi PCAP ditangguhkan.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan sebesar Rp 73.804.099.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 41.414.276.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp 32.389.823.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.360.185.576,- terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 26.485.189.533,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 23.874.996.043,- atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 68,23% hal ini dikarenakan adanya:

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Pengadaan CPNS Umum Formasi Tahun 2014, yakni:
 - 1) Formasi CPNS tahun 2014 dari pelamar umum, untuk pemberkasan NIP baru dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2014 (akhir Tahun Anggaran 2014) sehingga

- 2) Pengadaan CPNS formasi tahun 2014 dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) waktu pendaftaran dan adanya pembatasan pelamar untuk mendaftar berdampak pada jumlah pelamar, yakni untuk pelamar provinsi dari yang ditargetkan 25.000 hanya tercapai 4.197 pelamar dan untuk fasilitasi kab/kota dari yang ditargetkan 308.470 hanya tercapai 80.742 pelamar. Hal ini mengakibatkan belanja langsung untuk kegiatan Pengadaan CPNS dari anggaran sebesar Rp 9.779.267.000 hanya terealisasi sebesar Rp 4.617.323.750 atau 47,22%.
- b. Kegiatan Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembinaan Praja IPDN realisasi belanjanya hanya 62,39% atau Rp 970.398.000 dari anggaran sebesar Rp 1.555.410.000,- karena pendaftaran baru dibuka setelah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) mengumumkan hasil seleksi. Jumlah pendaftar yang ditargetkan 2.000 orang hanya terdapat 1.122 orang.
 - c. Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS hanya terealisasi sebesar 67,49% atau Rp 704.320.700 dari anggaran sebesar Rp 1.043.559.000,- karena menurunnya minat PNS untuk mengikuti Tugas Belajar.
 - d. Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS hanya terealisasi Rp 1.708.385.700,- atau 74,40 % dari anggaran sebesar Rp 2.296.000.000,- karena adanya perubahan regulasi Kenaikan Pangkat Bagi Jabatan Fungsional Guru sehingga dari yang semula ditargetkan 24.000 usul kenaikan pangkat hanya terealisasi 19.000 usul kenaikan pangkat.
 - e. Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi dan Fasilitasi Ujian Kedinasan hanya terealisasi sebesar Rp 289.495.415,- atau 77,77% dari anggaran sebesar Rp 372.220.000,- karena adanya beberapa PNS yang telah mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah.
 - f. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya terealisasi Rp 227.087.750,- atau 84,39% dari anggaran sebesar Rp 267.500.000,- karena penawaran dari pihak ke-tiga/terkait tidak sesuai dengan Tupoksi.

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan, yakni adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, strategi yang dilaksanakan yaitu Mengevaluasi kembali target-target pencapaian kegiatan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijakan yang berdampak pada pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

Satuan Kerja Prangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah
Fungsi : 1.20.10
Sub. Fungsi : 1.20.10
Provinsi : Jawa Tengah

| No | Program/Kegiatan | Jumlah Anggaran | Realisasi | Realisasi | | Keterangan |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---|
| | | (Rp) | (Rp) | Fisik (%) | Keu (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 41.414.276.000 | 26.490.045.033 | 63,95 | 63,95 | |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 26.061.839.000 | 13.209.573.833 | 50,69 | 50,69 | Penetapan NIP Honorer K2 baru selesai tahun 2014 sehingga Penggajiannya mulai tahun 2015; CPNS formasi 2014 baru pemberkasan pada tanggal 29 Desember 2014 sehingga Penggajiannya mulai tahun 2015. |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 15.352.437.000 | 13.275.615.700 | 86,47 | 86,47 | |
| 02 | BELANJA LANGSUNG | 32.389.823.000 | 23.874.996.043 | 99,40 | 73,71 | |
| I | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | |
| 01 | Penyediaan jasa surat-menyurat | 29.040.000 | 29.030.000 | 100 | 99,97 | |
| 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 683.000.000 | 548.412.069 | 100 | 85,96 | Terkait pelaksanaan CPNS yang dilaksanakan dengan CAT, mengurangi kegiatan-kegiatan internal seperti rapat-rapat di ruang BKD |
| 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran | 116.148.000 | 115.068.000 | 100 | 99,07 | |
| 04 | Jaminan barang milik daerah | 75.000.000 | 74.174.436 | 100 | 98,90 | |
| 05 | Penyediaan alat tulis kantor | 922.894.000 | 881.990.275 | 100 | 95,57 | |
| 06 | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | 510.614.000 | 405.239.000 | 100 | 79,36 | |
| 07 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | 26.400.000 | 26.305.300 | 100 | 99,64 | |
| 08 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 43.752.387 | 44.991.600 | 100 | 99,23 | |
| 09 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 13.200.000 | 13.200.000 | 100 | 100 | |
| 10 | Penyediaan makanan dan minuman | 176.300.000 | 176.244.600 | 100 | 99,97 | |
| 11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah | 1.000.000.000 | 942.830.860 | 100 | 99,28 | |
| 12 | Penyediaan jasa pelayanan perkantoran | 1.139.295.000 | 1.069.995.000 | 100 | 93,92 | |
| II | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | |
| 01 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | 429.000.000 | 404.728.000 | 100 | 98,41 | |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 02 | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | 1.565.373.000 | 1.505.055.500 | 100 | 96,15 | |
| 03 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional | 508.650.000 | 492.833.424 | 100 | 96,89 | |
| 04 | Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor | 86.840.000 | 86.613.500 | 100 | 99,74 | |
| 05 | Pemeliharaan rutin / berkala meubelair | 12.100.000 | 12.062.000 | 100 | 99,69 | |
| 06 | Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor dan rumah tangga | 242.900.000 | 237.410.000 | 100 | 97,74 | |
| 07 | Peningkatan sarana dan prasarana kantor | 772.385.000 | 752.468.500 | 100 | 97,42 | |
| III | Program Peningkatan disiplin aparatur | | | | | |
| 01 | Pengadaan pakaian dinas dan Atributnya | 198.550.000 | 195.241.250 | 100 | 98,54 | |
| IV | Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | | |
| 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | 267.500.000 | 227.087.750 | 100 | 84,89 | Penawaran diklat tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD |
| V | Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah | | | | | |
| 01 | Penyusunan DSP dan formasi PNS | 221.054.000 | 116.874.225 | 100 | 52,87 | Sudah adanya program aplikasi on line dari Jakarta, sehingga data dapat dilihat di SAPK dan Simpeg |
| 02 | Pengadaan CPNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi Seleksi Pengadaan CPNS Kab/Kota | 9.779.267.000 | 4.617.323.750 | 90 | 47,22 | 1. Pengadaan sewa jaringan tidak dilaksanakan 2. Pendaftaran CPNS bersamaan secara Nasional sehingga pelamar sedikit 3. Penetapan NIP CPNS Formasi umum Tahun 2014 dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 |
| 03 | Penataan PNS dalam jabatan struktural | 508.837.000 | 366.863.000 | 100 | 72,10 | Pelantikan tidak dilaksanakan setiap bulan |
| 04 | Penataan PNS dalam jabatan fungsional khusus | 98.604.000 | 87.310.300 | 100 | 88,55 | Efisiensi Anggaran honorarium pemeriksa berkas, narasumber. |
| 05 | Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 1.603.172.000 | 1.245.754.620 | 100 | 76,42 | Akomodasi dan transportasi tim pansel dari 7 orang hanya terealisasi 2 orang |
| 06 | Pengangkatan CPNS dan kenaikan pangkat PNS | 2.296.000.000 | 1.708.385.700 | 96,50 | 74,41 | 1. Adanya pemberlakuan Permenpan No 16 Tahun 2009 bahwa untuk tim penilai golongan IV jadi kewenangan Kab/Kota ; |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|-------|-------|--|
| | | | | | | 2. Ada regulasi baru untuk model PAK inpassing, tetapi dari tim penilai belum selesai dilaksanakan. |
| 07 | Mutasi dan pensiun PNSD | 702.900.000 | 631.966.850 | 100 | 99,59 | Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Rakor Kepegawaian |
| 08 | Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN | 1.555.410.000 | 970.398.000 | 100 | 62,39 | Jadwal penerimaan IPDN mundur bersamaan dengan penerimaan SNMPTN sehingga pendaftar hanya sedikit |
| 09 | Ujian Kedinas PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Kab/Kota | 372.220.000 | 289.495.415 | 100 | 77,78 | Target peserta ujian dinas tidak terpenuhi karena sudah mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah |
| 10 | Tes Kompetensi Pejabat Struktural Pem Prov Jateng dan Fasilitas Pejabat Struktural Pem Kab/Kota | 1.494.119.000 | 1.226.234.000 | 100 | 82,07 | Sesuai UU ASN, untuk JPT Kab/Kota harus dilaksanakan seleksi secara terbuka dengan pansel sehingga banyak Kab/Kota yang menunda pelaksanaan PCAP |
| 11 | Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural | 233.621.000 | 214.282.900 | 100 | 91,72 | |
| 12 | Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional | 16.379.000 | 16.379.000 | 100 | 100 | |
| 13 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian | 139.700.000 | 138.865.000 | 100 | 99,40 | |
| 14 | Layanan Administrasi Kepegawaian | 167.061.000 | 137.621.200 | 100 | 99,40 | Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
| 15 | Pemberian Bantuan Uang Duka PNS yang Meninggal Dunia | 37.182.000 | 28.955.000 | 95,60 | 77,87 | Dengan anggaran tersebut namun hanya terserap 84 orang yang diberi uang duka. |
| 16 | Perawatan Kesehatan Fisik dan Mental bagi PNS | 291.104.000 | 264.458.000 | 100 | 90,85 | |
| 17 | Penganugerahan Tanda Jasa kepada PNS Pem Prov Jateng dan Fasilitas Penganugerahan Tanda Jasa kepada PNS Kab/Kota | 317.100.000 | 270.757.000 | 100 | 85,39 | Adanya kesalahan kode rekening pada honor peneliti berkas |
| 18 | Pembekalan bagi PNS Pem Prov Jateng yang akan purna tugas | 484.040.000 | 476.875.000 | 100 | 98,52 | |
| 19 | Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS | 391.935.000 | 347.315.529 | 100 | 88,62 | 1. Beberapa kasus tidak dilakukan klarifikasi ; 2. Adanya penyesuaian standarisasi honorarium. |
| 20 | Pengelolaan Pusat Kebugaran PNS | 69.520.000 | 60.200.000 | 100 | 86,59 | Honor piket untuk Pejabat Struktural tidak terbayarkan karena dalam Standardisasi |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--|
| | | | | | | yang boleh terbayarkan hanya Petugas pusat kebugaran |
| 21 | Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian | 234.348.000 | 221.088.100 | 100 | 94,34 | |
| 22 | Pengelolaan Data Tata Naskah Kepegawaian | 357.566.000 | 352.244.208 | 100 | 98,51 | |
| 23 | Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kepegawaian di Jateng | 238.719.000 | 237.177.000 | 100 | 99,35 | |
| 24 | Pengembangan aplikasi Simpeg pada SKPD Prov. Jateng | 239.163.000 | 228.739.700 | 100 | 95,64 | |
| 25 | Pembinaan Kesejahteraan PNS Perempuan Prov. Jateng | 91.300.000 | 88.989.100 | 100 | 97,47 | |
| 26 | Bimtek Pembinaan PNS | 159.775.000 | 153.801.150 | 100 | 96,26 | |
| 27 | Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jateng | 169.535.000 | 161.822.992 | 100 | 95,45 | |
| 28 | Pengelolaan Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BN) | 160.085.000 | 156.158.740 | 100 | 97,55 | |
| 29 | Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng | 1.043.559.000 | 704.320.700 | 100 | 67,49 | Peminat Tugas Belajar berkurang karena adanya kenaikan TPP yang lebih besar dari tunjangan belajar |
| 30 | Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum | 114.016.000 | 113.358.800 | 100 | 99,42 | |
| | Jumlah Total Belanja | 73.804.099.000 | 50.365.041.076 | 81,68 | 68,24 | |

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam Laporan Keuangan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyajikan kembali Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 disajikan secara kas menuju akrual dan secara akrual. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menerangkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan secara kas menuju akrual yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Di tahun 2014 merupakan masa transisi dari Laporan Keuangan berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan berbasis akrual. Untuk melengkapi Laporan Keuangan menjadi berbasis akrual maka dibuat Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan ekuitas dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- 1) Kas di kas daerah
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 4) Tanah
- 5) Peralatan dan Mesin
- 6) Gedung dan Bangunan
- 7) Asset Tetap Lainnya
- 8) Pendapatan
- 9) Belanja

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.1.1 Aset

5.1.1.1 Aset Lancar

5.1.1.1.1 Kas

5.1.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

| NO | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|--------|------|------|
| 1 | Tunai | Rp 0 | Rp 0 |
| 2 | Bank | Rp 0 | Rp 0 |
| | Jumlah | Rp 0 | Rp 0 |

5.1.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa)

| NO | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|--------|------|------|
| 1 | Tunai | Rp 0 | Rp 0 |
| 2 | Bank | Rp 0 | Rp 0 |
| | Jumlah | Rp 0 | Rp 0 |

5.1.1.1.1.3 Kas Di Bendahara Penerimaan

| NO | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|--------|------|------|
| 1 | Tunai | 0 | Rp 0 |
| 2 | Bank | 0 | Rp 0 |
| | Jumlah | 0 | Rp 0 |

5.1.1.1.2 Persediaan

5.1.1.1.2.1 Persediaan Bahan Pakai Habis

| NO | NAMA JENIS BARANG | JUMLAH SATUAN | HARGA SATUAN | NILAI PERSEDIAAN |
|----|--|---------------|--------------|------------------|
| | ALAT TULIS KANTOR | | | |
| 1 | Amplop PUTIH besar | 7 | Rp 23.200 | Rp 162.400 |
| 2 | Amplop PUTIH KECIL | 18 | Rp 13.000 | Rp 234.000 |
| 3 | Amplop PUTIH tanggung | 10 | Rp 21.200 | Rp 212.000 |
| 4 | Album Jumbo | 1 | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
| 5 | Album Jumbo | 5 | Rp 96.000 | Rp 480.000 |
| 6 | Ballpoint BOLLINER hitam, PILOT | 5 | Rp 17.500 | Rp 87.500 |
| 7 | Ballpoint Faster Merah | 33 | Rp 4.000 | Rp 132.000 |
| 8 | Ballpoint Faster hitam | 36 | Rp 4.000 | Rp 144.000 |
| 9 | Ballpoint Gel ink pen black 0,5 mm | 72 | Rp 7.000 | Rp 504.000 |
| 10 | Bantalan Stempel | 23 | Rp 11.000 | Rp 253.000 |
| 11 | Bantalan penghitung uang | 1 | Rp 4.000 | Rp 4.000 |
| 12 | Bantalan penghitung uang | 35 | Rp 5.000 | Rp 175.000 |
| 13 | Batubaterai Besar ABC | 23 | Rp 21.000 | Rp 483.000 |
| 14 | Batubaterai kecil ABC | 7 | Rp 8.000 | Rp 56.000 |
| 15 | Batu Kamera SANYO Ni-MH2500 HR-3U 1.2V | 10 | Rp 49.500 | Rp 495.000 |
| 16 | Batu baterai REMOTE A2 ALKALIN | 4 | Rp 10.000 | Rp 40.000 |
| 17 | Batu Baterai kotak 9V | 25 | Rp 35.000 | Rp 875.000 |
| 18 | Binder Clips | 60 | Rp 19.350 | Rp 1.161.000 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|----|---------|----|-----------|
| 19 | Box File | 13 | Rp | 20.000 | Rp | 260.000 |
| 20 | Buku Expedisi isi 100 | 26 | Rp | 17.000 | Rp | 442.000 |
| 21 | Buku Tulis Folio isi 100 | 42 | Rp | 17.000 | Rp | 714.000 |
| 22 | Buku Tulis Folio isi 200 | 4 | Rp | 31.500 | Rp | 126.000 |
| 23 | Buku Tulis kwarto isi 200 | 18 | Rp | 14.000 | Rp | 252.000 |
| 24 | Buku Tulis Kwarto isi 100 | 90 | Rp | 6.500 | Rp | 585.000 |
| 25 | Buku Tulis isi 38 | 59 | Rp | 3.000 | Rp | 177.000 |
| 26 | Buku Tulis isi 38 | 32 | Rp | 2.800 | Rp | 89.600 |
| 27 | Card Reader Witer | 3 | Rp | 45.000 | Rp | 135.000 |
| 28 | Casset Mini DV | 8 | Rp | 92.600 | Rp | 740.800 |
| 29 | CD-RW | 97 | Rp | 9.000 | Rp | 873.000 |
| 30 | CD-R | 39 | Rp | 3.000 | Rp | 117.000 |
| 31 | CD-DVD | 74 | Rp | 10.500 | Rp | 777.000 |
| 32 | CALCULATOR | 13 | Rp | 135.000 | Rp | 1.755.000 |
| 33 | Cutter kecil | 71 | Rp | 7.000 | Rp | 497.000 |
| 34 | Cutter besar | 60 | Rp | 20.000 | Rp | 1.200.000 |
| 35 | Disket 2 HD FUJI | 477 | Rp | 5.000 | Rp | 2.385.000 |
| 36 | Data Print (DP 27) | 19 | Rp | 28.000 | Rp | 532.000 |
| 37 | Data Print (DP 27) | 60 | Rp | 27.000 | Rp | 1.620.000 |
| 38 | Data Print (DP.28) | 12 | Rp | 28.000 | Rp | 336.000 |
| 39 | Data Print (DP.28) | 72 | Rp | 27.000 | Rp | 1.944.000 |
| 40 | Data Print (DP.615) unt. HP.15-45 | 10 | Rp | 37.500 | Rp | 375.000 |
| 41 | Flash Disk | 2 | Rp | 100.000 | Rp | 200.000 |
| 42 | Gunting | 28 | Rp | 13.000 | Rp | 364.000 |
| 43 | Isi ballpoint PENTEL | 53 | Rp | 21.000 | Rp | 1.113.000 |
| 44 | Isi Cutter kecil | 100 | Rp | 4.500 | Rp | 450.000 |
| 45 | Isi Cutter besar | 21 | Rp | 15.000 | Rp | 315.000 |
| 46 | Isi Staples besar | 123 | Rp | 3.100 | Rp | 381.300 |
| 47 | Isi Staples kecil | 5 | Rp | 1.200 | Rp | 6.000 |
| 48 | Isolasi PANFIK besar dan Kecil | 31 | Rp | 18.000 | Rp | 558.000 |
| 49 | Karbon Double Folio Daito | 35 | Rp | 100.000 | Rp | 3.500.000 |
| 50 | Karbon Double Folio Daito | 3 | Rp | 85.900 | Rp | 257.700 |
| 51 | Karbon Folio | 15 | Rp | 35.000 | Rp | 525.000 |
| 52 | Karet Gelang | 24 | Rp | 24.500 | Rp | 588.000 |
| 53 | Kertas continouse form 1ply 9,5 x 11" | 6 | Rp | 175.000 | Rp | 1.050.000 |
| 54 | Kertas continouse form 1ply 9,5 x 11" | 10 | Rp | 176.000 | Rp | 1.760.000 |
| 55 | Kertas continouse form 1ply 14 7/8 x 11" | 6 | Rp | 240.000 | Rp | 1.440.000 |
| 56 | Kertas continouse form 1ply 14 7/8 x 11" | 2 | Rp | 243.000 | Rp | 486.000 |
| 57 | Kertas continouse form 1ply 14 7/8 x 11" | 5 | Rp | 270.000 | Rp | 1.350.000 |
| 58 | Kertas continouse form 2ply 9,5 x 11" | 1 | Rp | 205.280 | Rp | 205.280 |
| 59 | Kertas continouse form 2ply 9,5 x 11" | 5 | Rp | 180.000 | Rp | 900.000 |
| 60 | Kertas continouse form 2ply 14 7/8 x 11" | 12 | Rp | 275.000 | Rp | 3.300.000 |
| 61 | Kertas continouse form 2ply 14 7/8 x 11" | 1 | Rp | 350.000 | Rp | 350.000 |
| 62 | Kertas HVS DF BERGARIS | 23 | Rp | 36.000 | Rp | 828.000 |
| 63 | Kertas HVS double FOLIO 70 gr | 19 | Rp | 75.000 | Rp | 1.425.000 |
| 64 | Kertas HVS Folio JAMBON | 9 | Rp | 53.000 | Rp | 477.000 |
| 65 | Kertas HVS Folio BIRU | 4 | Rp | 53.000 | Rp | 212.000 |
| 66 | Kertas HVS Folio KUNING | 2 | Rp | 53.000 | Rp | 106.000 |
| 67 | Kertas HVS Folio HIJAU | 4 | Rp | 53.000 | Rp | 212.000 |
| 68 | Kwitansi Panjang | 22 | Rp | 14.000 | Rp | 308.000 |
| 69 | Lak ban coklat | 11 | Rp | 11.000 | Rp | 121.000 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----|-----------|----|-----------|
| 70 | Lem kertas | 47 | Rp | 6.000 | Rp | 282.000 |
| 71 | Pembolong 40 XL-KENKO | 60 | Rp | 44.000 | Rp | 2.640.000 |
| 72 | Pembolong 40 XL-KENKO | 30 | Rp | 90.000 | Rp | 2.700.000 |
| 73 | Penggaris Plastik 30 cm | 73 | Rp | 7.000 | Rp | 511.000 |
| 74 | Penggaris 40 cm / AMC | 23 | Rp | 8.000 | Rp | 184.000 |
| 75 | Penggaris 40 cm / AMC | 100 | Rp | 10.000 | Rp | 1.000.000 |
| 76 | Penghapus Black Board/Papan Tulis | 30 | Rp | 8.700 | Rp | 261.000 |
| 77 | Penghapus Black Board/Papan Tulis | 17 | Rp | 7.800 | Rp | 132.600 |
| 78 | Pita Epson LX - 300 | 12 | Rp | 73.000 | Rp | 876.000 |
| 79 | Pita Epson LX - 310 | 8 | Rp | 73.000 | Rp | 584.000 |
| 80 | Pita mesin ketik hitam, DAITO | 64 | Rp | 16.500 | Rp | 1.056.000 |
| 81 | Pita Printer LQ 2170/2180 | 25 | Rp | 185.000 | Rp | 4.625.000 |
| 82 | Portaple / Map bertali | 165 | Rp | 4.800 | Rp | 792.000 |
| 83 | Remover RZA, MAX | 53 | Rp | 21.000 | Rp | 1.113.000 |
| 84 | Refil Toner Laserjet 06 F / 06 L + drum | 2 | Rp | 280.000 | Rp | 560.000 |
| 85 | Refil Toner Laserjet 1300/ 13A + drum | 1 | Rp | 306.000 | Rp | 306.000 |
| 86 | Refil Toner Laserjet 1000/15A + drum | 1 | Rp | 330.000 | Rp | 330.000 |
| 87 | Refil Toner Laserjet 29 X + drum | 2 | Rp | 560.000 | Rp | 1.120.000 |
| 88 | Refil Toner Laserjet 2100 / 96A + drum | 1 | Rp | 350.000 | Rp | 350.000 |
| 89 | Refil Tinta Epson ber-ID Botol 60 ml black | 4 | Rp | 100.800 | Rp | 403.200 |
| 90 | Refil Tinta Epson ber-ID Botol 60 ml yellow | 1 | Rp | 100.800 | Rp | 100.800 |
| 91 | Refil Tinta Epson ber-ID Botol 60 ml cyan | 1 | Rp | 100.800 | Rp | 100.800 |
| 92 | Setip Ballpoint / PELIKAN | 234 | Rp | 3.200 | Rp | 748.800 |
| 93 | Setip Ballpoint / PELIKAN | 100 | Rp | 3.500 | Rp | 350.000 |
| 94 | Snelheakter / Stopmap PLASTIK | 4 | Rp | 16.000 | Rp | 64.000 |
| 95 | Snelektter kertas | 800 | Rp | 2.500 | Rp | 2.000.000 |
| 96 | Spidol kecil warna hitam, biru & merah | 461 | Rp | 1.000 | Rp | 461.000 |
| 97 | Spidol MARKER besar hitam | 161 | Rp | 5.800 | Rp | 933.800 |
| 98 | Stabilo/Boss | 211 | Rp | 8.500 | Rp | 1.793.500 |
| 99 | Stapler / steples HD-10 Kecil | 84 | Rp | 30.000 | Rp | 2.520.000 |
| 100 | Stapler / steples HD-50 Besar | 109 | Rp | 55.000 | Rp | 5.995.000 |
| 101 | Stip pencil, STEADLER | 163 | Rp | 2.500 | Rp | 407.500 |
| 102 | Tali Rafia besar | 38 | Rp | 22.500 | Rp | 855.000 |
| 103 | Tinta Hp INKJET C.9351A Black 21 | 9 | Rp | 230.400 | Rp | 2.073.600 |
| 104 | Tinta Hp INKJET C.9352 Colour 22 | 10 | Rp | 370.000 | Rp | 3.700.000 |
| 105 | Tinta HP INKJET 3326 / 27 | 13 | Rp | 255.000 | Rp | 3.315.000 |
| 106 | Tinta HP INKJET 3325 / 28 | 5 | Rp | 300.000 | Rp | 1.500.000 |
| 107 | Tinta Catridge Hp INKJET 60 black | 6 | Rp | 222.000 | Rp | 1.332.000 |
| 108 | Tinta Catridge Hp INKJET 60 color | 6 | Rp | 265.200 | Rp | 1.591.200 |
| 109 | Tinta Hp INKJET .730 / 703 black | 10 | Rp | 225.000 | Rp | 2.250.000 |
| 110 | Tinta Hp INKJET .730 / 703 colour | 13 | Rp | 235.000 | Rp | 3.055.000 |
| 111 | Toner Laserjet HP 29 X | 1 | Rp | 1.439.000 | Rp | 1.439.000 |
| 112 | Toner Printer HP Laserjet 6 L, 06 F | 1 | Rp | 867.600 | Rp | 867.600 |
| 113 | Toner printer HP laserjet 2100 C.4096.A - (96A) | 2 | Rp | 1.150.000 | Rp | 2.300.000 |
| 114 | Toner printer HP Laserjet 1200 C.7115.A - (15A) | 3 | Rp | 950.000 | Rp | 2.850.000 |
| 115 | Toner Printer HP Laserjet CB.540 Black | 3 | Rp | 950.000 | Rp | 2.850.000 |
| 116 | Toner Printer HP Laserjet CB.541 Cyan | 2 | Rp | 990.000 | Rp | 1.980.000 |
| 117 | Toner Printer HP Laserjet CB.542 Yellow | 3 | Rp | 990.000 | Rp | 2.970.000 |
| 118 | Toner Printer HP Laserjet CB.543 Magenta | 2 | Rp | 990.000 | Rp | 1.980.000 |
| 119 | Tinta nomerator warna UNGU, LION | 141 | Rp | 10.000 | Rp | 1.410.000 |
| 120 | Tinta nomerator warna UNGU, LION | 51 | Rp | 11.000 | Rp | 561.000 |

| | | | | | | |
|-----|--|------|----|-----------|-----------|--------------------|
| 121 | Tinta nomerator warna HITAM | 8 | Rp | 11.000 | Rp | 88.000 |
| 122 | Tip Ex | 133 | Rp | 38.500 | Rp | 5.120.500 |
| | JUMLAH ALAT TULIS KANTOR | | | | Rp | 123.682.480 |
| | | | | | | |
| | ALAT TULIS KANTOR PERUBAHAN | | | | | |
| 1 | Kertas HVS Folio 70 gr F.4 | 7 | Rp | 40.000 | Rp | 280.000 |
| 2 | Kertas Countinous Form 4 ply 14 7/8 x 11" carbon | 53 | Rp | 562.000 | Rp | 29.786.000 |
| 3 | Pita Cartridge Compuprint 10300 type PRKN 102 | - | Rp | 810.000 | Rp | - |
| 4 | Tita Cartridge HP 21 Black | 5 | Rp | 230.400 | Rp | 1.152.000 |
| 5 | Tita Cartridge HP 22 Colour | 5 | Rp | 370.000 | Rp | 1.850.000 |
| 6 | Tita asli epon T.6641 BK - Black | 5 | Rp | 110.000 | Rp | 550.000 |
| 7 | Tita asli epon T.6642 C - Cyan | 5 | Rp | 110.000 | Rp | 550.000 |
| 8 | Tita asli epon T.6643 M - Magenta | 5 | Rp | 110.000 | Rp | 550.000 |
| 9 | Tita asli epon T.6644 Y - Yellow | 5 | Rp | 110.000 | Rp | 550.000 |
| 10 | Tita Cartridge Brother LC.400 - Black | 3 | Rp | 234.000 | Rp | 702.000 |
| 11 | Tita Cartridge Brother LC.400 - Yellow | 1 | Rp | 138.000 | Rp | 138.000 |
| 12 | Tita Cartridge Brother LC.400 - Cyan | 1 | Rp | 138.000 | Rp | 138.000 |
| 13 | Tita Cartridge Brother LC.400 - Magenta | 1 | Rp | 138.000 | Rp | 138.000 |
| 14 | Toner Laserjet HP Q 2612 A | - | Rp | 1.000.000 | Rp | - |
| 15 | Toner Laserjet HP Q 2613 A | 7 | Rp | 1.100.000 | Rp | 7.700.000 |
| 16 | Toner Laserjet HP CB 435 A | - | Rp | 950.000 | Rp | - |
| 17 | Toner Laserjet HP CB 436 A | 3 | Rp | 950.000 | Rp | 2.850.000 |
| 18 | Toner Laserjet HP CB 540 A Black | 3 | Rp | 950.000 | Rp | 2.850.000 |
| 19 | Toner Laserjet HP CB 541 A Cyan | 2 | Rp | 990.000 | Rp | 1.980.000 |
| 20 | Toner Laserjet HP CB 542 A Yellow | 2 | Rp | 990.000 | Rp | 1.980.000 |
| 21 | Toner Laserjet HP CB 543 Magenta | 2 | Rp | 990.000 | Rp | 1.980.000 |
| 22 | Toner Laserjet HP Q 5949 A | 9 | Rp | 1.200.000 | Rp | 10.800.000 |
| 23 | Toner Laserjet HP Q 7553 A | - | Rp | 1.200.000 | Rp | - |
| 24 | Toner Laserjet HP CE 278 A | - | Rp | 950.000 | Rp | - |
| 25 | Toner Laserjet HP CE 285 A | 10 | Rp | 1.000.000 | Rp | 10.000.000 |
| | JUMLAH ALAT TULIS KANTOR PERUBAHAN | | | | Rp | 76.524.000 |
| | JUMLAH ALAT TULIS KANTOR | | | | Rp | 200.206.480 |
| | | | | | | |
| | BARANG CETAKAN | | | | | |
| 1 | Amplop BKD Besar | 3500 | Rp | 2.300 | Rp | 8.050.000 |
| 2 | Amplop BKD Besar Berkantong | 1500 | Rp | 3.000 | Rp | 4.500.000 |
| 3 | Amplop BKD Kecil | 850 | Rp | 1.300 | Rp | 1.105.000 |
| 4 | Amplop BKD Kecil berkantong | 550 | Rp | 1.500 | Rp | 825.000 |
| 5 | Amplop BKD Kwarto berkantong | 800 | Rp | 2.000 | Rp | 1.600.000 |
| 6 | Amplop BKD Kwarto berkantong | 800 | Rp | 2.200 | Rp | 1.760.000 |
| 7 | Amplop BKD Kwarto | 900 | Rp | 2.000 | Rp | 1.800.000 |
| 8 | Amplop GUBERNUR Besar / kabinet | 3300 | Rp | 2.300 | Rp | 7.590.000 |
| 9 | Amplop GUBERNUR Kecil | 2500 | Rp | 1.300 | Rp | 3.250.000 |
| 10 | Amplop SETDA Besar / kabinet | 1100 | Rp | 2.250 | Rp | 2.475.000 |
| 11 | Amplop SETDA Kecil | 2200 | Rp | 1.300 | Rp | 2.860.000 |
| 12 | Blangko DP.3 | 1 | Rp | 300.000 | Rp | 300.000 |
| 13 | Blangko Format Model DK / SKUMPTK | 4 | Rp | 130.000 | Rp | 520.000 |
| 14 | Blangko Bukti Pematongan PPh Pasal 21 final | 10 | Rp | 70.000 | Rp | 700.000 |
| 15 | Blangko Bukti Pematongan PPh Pasal 21 final | 10 | Rp | 64.000 | Rp | 640.000 |
| 16 | Blangko Pematongan PPh Pasal 23 | 10 | Rp | 70.000 | Rp | 700.000 |
| 17 | Buku Agenda Surat Masuk | 17 | Rp | 57.000 | Rp | 969.000 |

| | | | | | | |
|----|---|------|----|---------|-----------|--------------------|
| 18 | Buku Agenda Surat Keluar | 4 | Rp | 70.000 | Rp | 280.000 |
| 19 | Buku Agenda Surat Keluar | 25 | Rp | 57.000 | Rp | 1.425.000 |
| 20 | Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran | 15 | Rp | 70.000 | Rp | 1.050.000 |
| 21 | Buku Kas penerimaan bend.1 | 9 | Rp | 70.000 | Rp | 630.000 |
| 22 | Buku penilaian kinerja Pegawai | 300 | Rp | 90.000 | Rp | 27.000.000 |
| 23 | Buku Pajak dan PPN, PPH Bend. 17 | 15 | Rp | 70.000 | Rp | 1.050.000 |
| 24 | Buku Bon Barang NCR | 15 | Rp | 24.500 | Rp | 367.500 |
| 25 | Disposisi warna Merah | 46 | Rp | 100.000 | Rp | 4.600.000 |
| 26 | KENDALI Surat Masuk | 146 | Rp | 13.000 | Rp | 1.898.000 |
| 27 | KENDALI Surat Keluar | 75 | Rp | 12.000 | Rp | 900.000 |
| 28 | Kop Surat BKD (Pinggir) | 177 | Rp | 119.000 | Rp | 21.063.000 |
| 29 | Kop Surat GUBERNUR (Pinggir) | 17 | Rp | 119.000 | Rp | 2.023.000 |
| 30 | Kop Surat Gubernur untuk SK | 29 | Rp | 119.000 | Rp | 3.451.000 |
| 31 | Surat Setoran Pajak (SSP) | 21 | Rp | 75.000 | Rp | 1.575.000 |
| 32 | Surat Tanda Setoran (STS) | 1 | Rp | 70.000 | Rp | 70.000 |
| 33 | Surat perintah perjalanan dinas pegawai (SPPD) | 1 | Rp | 130.000 | Rp | 130.000 |
| 34 | Surat Bukti Pengeluaran C5 bend. 22 (B.10.12) | 118 | Rp | 41.500 | Rp | 4.897.000 |
| 35 | Stopmap BKD Rahasia | 450 | Rp | 6.000 | Rp | 2.700.000 |
| 36 | Stopmap BKD Folio Berlogo 5 warna | 1800 | Rp | 6.000 | Rp | 10.800.000 |
| 37 | Stopmap BKD kwarto Berlogo 5 warna | 1800 | Rp | 5.000 | Rp | 9.000.000 |
| 38 | Stopmap BATIK | 550 | Rp | 6.000 | Rp | 3.300.000 |
| | | | | | Rp | 137.853.500 |
| | BARANG CETAKAN PERUBAHAN | | | | | |
| 1 | Kertas Kop Surat Gubernur untuk SK Logo Emas | 2 | Rp | 250.000 | Rp | 500.000 |
| | | | | | Rp | 500.000 |
| | JUMLAH CETAK | | | | Rp | 138.353.500 |
| | JUMLAH ALAT TULIS DAN CETAK | | | | Rp | 338.559.980 |

*Sumber Stock Opname barang Triwulan IV

5.1.1.2 Aset Tetap

| No | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Tanah | Rp. 6.421.500.000 | Rp. 6.421.500.000 |
| 2 | Peralatan & Mesin | Rp. 8.375.433.159 | Rp. 8.138.755.440 |
| 3 | Gedung & Bangunan | Rp. 6.321.497.700 | Rp. 6.321.497.700 |
| 4 | Jalan, Irigasi & Jaringan | Rp. 799.998.000 | Rp. 799.998.000 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | Rp. 19.456.000 | Rp. 16.532.500 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 7 | Akumulasi penyusutan | Rp. (9.124.538.687,16) | Rp. (4.233.602.877) |
| | Jumlah | Rp. 12.813.346.171,84 | Rp. 17.464.680.763 |

Rincian mutasi aset terdiri dari :

| Penambahan | 2014 |
|-----------------------------|--------------------------|
| Belanja Modal dan Penilaian | Rp. 1.157.196.500 |
| Belanja Barang / Jasa | Rp. 16.625.000 |
| Hibah | Rp. 0 |
| Mutasi Masuk | Rp. 0 |
| Reklasifikas | Rp. 197.915.756 |
| Koreksi | Rp. 0 |
| Penilaian | Rp. 0 |
| Jumlah | Rp. 1.371.737.256 |

| Pengurangan | 2014 |
|--------------------|-----------------------------|
| Penghapusan | Rp. 0 |
| Ekstrakontable | Rp. 5.350.000 |
| Reklasifikasi | Rp. 1.126.786.037 |
| Hibah | Rp. 0 |
| Mutasi Keluar | Rp. 0 |
| Koreksi | Rp. 0 |
| Penyusutan | Rp. 1.094.561.577,36 |
| Jumlah | Rp. 2.226.697.614,36 |

5.1.1.2.1 Tanah

| No | Uraian | 2014 | 2013 |
|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Tanah | Rp. 6.421.500.000 | Rp. 6.421.500.000 |
| | Jumlah | Rp. 6.421.500.000 | Rp. 6.421.500.000 |

5.1.1.2.2 Peralatan dan Mesin

| No | Uraian | 2014 | 2013 |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Alat-alat Berat | Rp. 37.205.000 | Rp. 0 |
| 2 | Alat-alat Angkutan | Rp. 1.833.464.768 | Rp. 1.970.186.768 |
| 3 | Alat-alat Bengkel | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp. 6.141.027.085 | Rp. 5.872.148.122 |
| 6 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | Rp. 218.817.656 | Rp. 158.501.900 |
| 7 | Alat-alat Kedokteran | Rp. 56.498.650 | Rp. 49.498.650 |
| 8 | Alat-alat Laboratorium | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 9 | Alat Meteorologi dan Geofisika | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 10 | Alat-alat Keamanan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 11 | Alat-alat Olahraga | Rp. 88.420.000 | Rp. 88.420.000 |
| | Jumlah | Rp. 8.375.433.159 | Rp. 8.138.755.440 |

5.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan

| No | Uraian | 2014 | 2013 |
|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Gedung | Rp. 6.321.497.700 | Rp. 6.321.497.700 |
| 2 | Bangunan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Jumlah | Rp. 6.321.497.700 | Rp. 6.321.497.700 |

5.1.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

| No | Uraian | 2014 | 2013 |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Jalan dan Jembatan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 2 | Bangunan air / Irigasi | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 3 | Instalasi dan Jaringan | Rp. 799.998.000 | Rp. 799.998.000 |
| | Jumlah | Rp. 799.998.000 | Rp. 799.998.000 |

5.1.1.2.5 Aset tetap Lainnya

| No | Uraian | 2014 | 2013 |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Buku Perpustakaan | Rp. 19.456.000 | Rp. 16.532.500 |
| 2 | Barang Bercorak Kesenian/ Kebud | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 3 | Hewan Ternak dan Tumbuhan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Jumlah | Rp. 19.456.000 | Rp. 16.532.500 |

5.1.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

| No | Uraian | Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2014 | Saldo Awal Akumulasi Penyusutan | Koreksi/Penyesuaian Saldo Awal (Bertambah) | Saldo Awal Stlh Koreksi Penyesuaian | Penyesuaian Penyusutan | Beban Penyusutan 2014 | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku Per 31 Desember 2014 |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| A | PERALATAN DAN MESIN | 8.287.013.159,31 | 1.382.633.444,50 | 4.520.079.462,80 | 5.902.712.907,30 | 923.598.080 | 945.819.207,80 | 5.924.934.035,10 | 2.362.079.124,21 |
| 1 | ALAT BESAR | 37.205.000,00 | - | - | - | - | 3.720.500,00 | 3.720.500,00 | 33.484.500,00 |
| 2 | ALAT ANGKUT | 1.833.464.768,00 | 1.382.633.444,50 | - | 1.382.633.444,50 | 550.000.000 | 150.350.274,50 | 982.983.719,00 | 850.481.049,00 |
| 3 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 6.141.027.085,31 | - | 4.374.343.252,80 | 4.374.343.252,80 | 367.328.080 | 750.924.902,10 | 4.757.940.074,90 | 1.383.087.010,41 |
| 4 | ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI | 218.817.656,00 | - | 104.109.560,00 | 104.109.560,00 | 6.270.000 | 35.385.531,20 | 133.225.091,20 | 85.592.564,80 |
| 5 | ALAT KEDOKTERAN | 56.498.650,00 | - | 41.626.650,00 | 41.626.650,00 | - | 5.438.000,00 | 47.064.650,00 | 9.434.000,00 |
| B | GEDUNG, BANGUNAN DAN MONUMEN | 6.321.497.700,00 | 2.850.969.432,59 | - | 2.850.969.432,59 | - | 128.742.419,56 | 2.979.711.852,15 | 3.341.785.847,85 |
| 1 | BANGUNAN GEDUNG | 6.321.497.700,00 | 2.850.969.432,59 | - | 2.850.969.432,59 | - | 128.742.419,56 | 2.979.711.852,15 | 3.341.785.847,85 |
| C | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 799.998.000,00 | - | 199.892.850,00 | 199.892.850,00 | - | 19.999.950,00 | 219.892.800,00 | 580.105.200,00 |
| 1 | INSTALASI | 799.998.000,00 | - | 199.892.850,00 | 199.892.850,00 | - | 19.999.950,00 | 219.892.800,00 | 580.105.200,00 |
| | Jumlah | 15.408.508.859,31 | 4.233.602.877,09 | 4.719.972.312,80 | 8.953.575.189,89 | 923.598.080 | 1.094.561.577,36 | 9.124.538.687,25 | 6.283.970.172,06 |

5.1.1.2.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan

| No | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Konstruksi dalam pengerjaan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Jumlah | Rp. 0 | Rp. 0 |

5.1.1.3 Aset Lainnya

| No | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|----------------|--------------|--------------|
| 1 | Aset Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Jumlah | Rp. 0 | Rp. 0 |

5.1.3 Ekuitas Dana

5.1.3.1 Ekuitas Dana Lancar

| NO | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | Rp. (45.785.896.576) | Rp. (31.311.614.286) |
| 2 | Pendapatan yang ditangguhkan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 3 | Cadangan Piutang | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 4 | Cadangan Persediaan | Rp. 338.559.980 | Rp. 331.763.656 |
| 5 | Dana yg harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Jumlah | Rp. (45.447.336.596) | Rp. (30.979.850.630) |

5.1.3.2 Ekuitas Dana Investasi

| NO | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|---|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 2 | Diinvestasikan dalam Aset Tetap | Rp. 12.813.346.171,84 | Rp. 17.464.680.763 |
| 3 | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | Rp. 928.870.281,00 | Rp. 0 |
| 4 | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | Jumlah | Rp. 13.742.216.452,84 | Rp. 17.464.680.763 |

5.2 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1 Pendapatan

5.2.1.1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

| NO | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Hasil Penjualan Aset daerah yang tdk dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 2 | Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 3 | Penerimaan Fasilitas Sosial & Fas Umum | Rp. 2.540.820.000 | Rp. 24.614.000 |
| 4 | Penerimaan dari Penyelenggaraan Diklat | Rp. 1.813.469.000 | Rp. 1.910.797.000 |
| 5 | Pendapatan dari pengembalian | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 6 | Penerimaan Jasa dana bergulir | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 7 | Pendapatan BLUD | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 8 | Penerimaan Lainnya | Rp. 220.000.000 | Rp. 51.975.000 |
| | Jumlah | Rp. 4.574.289.000 | Rp. 1.987.386.000 |

5.2.2 Belanja

5.2.2.1 Belanja Operasi

5.2.2.1.1 Belanja Pegawai

| NO | Uraian | 2014 | 2013 |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| I | Belanja Tidak Langsung | 26.485.189.533 | Rp. 11.625.832.271 |
| II | Belanja Langsung | 6.035.064.600 | Rp. 6.102.263.945 |
| 1 | Honorarium PNS | 4.343.776.600 | Rp. 4.153.758.545 |
| 2 | Honorarium Non PNS | 1.691.288.000 | Rp. 1.948.505.400 |
| 3 | Uang Lembur | 0 | Rp. 0 |
| | Jumlah | 38.555.318.733 | Rp. 17.728.096.216 |

5.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

| NO | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | Rp. 1.342.575.525 | Rp. 1.717.664.850 |
| 2 | Belanja Bahan / Material | Rp. 82.212.000 | Rp. 119.227.000 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 2.195.091.469 | Rp. 1.538.032.609 |
| 4 | Belanja Premi Asuransi | Rp. 74.174.436 | Rp. 29.407.500 |
| 5 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | Rp. 492.833.424 | Rp. 278.971.869 |
| 6 | Belanja Cetak dan Penggandaan | Rp. 913.149.440 | Rp. 1.070.658.590 |
| 7 | Belanja Sewa Rumah/ Gedung / Gudang / Parkir | Rp. 1.614.399.240 | Rp. 973.071.100 |
| 8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | Rp. 79.300.000 | Rp. 92.000.000 |
| 9 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Rp. 1.905.042.830 | Rp. 290.991.000 |
| 10 | Belanja Makan dan Minum | Rp. 927.265.350 | Rp. 918.303.838 |
| 11 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | Rp. 132.921.250 | Rp. 110.810.000 |
| | Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu | Rp. 62.320.0000 | Rp. 0 |
| 12 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 3.715.707.229 | Rp. 61.636.000 |
| 13 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | Rp. 629.274.000 | Rp. 3.663.975.359 |
| 14 | Belanja kursus, Lat, sos & bintek PNS | Rp. 225.182.750 | Rp. 516.926.000 |
| 15 | Belanja Pemeliharaan | Rp. 1.841.141.000 | Rp. 249.671.650 |
| 16 | Belanja Jasa Konsultansi | Rp. 392.845.000 | Rp. 2.150.442.205 |
| 17 | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | Rp. 57.300.000 | Rp. 0 |
| | Jumlah | Rp. 14.727.146.193 | Rp. 14.034.588.570 |

5.2.2.1.3 Belanja Modal

5.2.2.1.3.1 Belanja Modal Peralatan & Mesin

| NO | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 | BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | Rp 404.728.000 | Rp. 523.296.000 |
| 2 | BM Pengadaan Peralatan Kantor | Rp 138.810.000 | Rp. 73.900.000 |
| 3 | BM Pengadaan Perlengkapan Kantor | Rp 178.907.000 | Rp. 293.386.000 |
| 4 | BM Pengadaan Komputer | Rp 341.212.000 | Rp. 297.231.000 |
| 5 | BM Pengadaan Mebeulair | Rp 83.616.000 | Rp. 339.523.500 |
| 6 | BM Pengadaan Alat-alat Kedokteran | Rp 7.000.000 | Rp. 6.480.000 |
| | Jumlah | Rp 1.154.273.000 | Rp. 1.533.816.500 |

5.2.2.1.3.2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| NO | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | BM Pengadaan Buku/Kepustakaan | Rp 2.923.500 | Rp 2.499.000 |
| | Jumlah | Rp 2.923.500 | Rp 2.499.000 |

5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.1.1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

| NO | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Hasil Penjualan Aset daerah yang tdk dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 2 | Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 3 | Penerimaan Fasilitas Sosial & Fas Umum | Rp. 2.540.820.000 | Rp. 24.614.000 |
| 4 | Penerimaan dari Penyelenggaraan Diklat | Rp. 1.813.469.000 | Rp. 1.910.797.000 |
| 5 | Pendapatan dari pengembalian | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 6 | Penerimaan Jasa dana bergulir | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 7 | Pendapatan BLUD | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 8 | Penerimaan Lainnya | Rp. 220.000.000 | Rp. 51.975.000 |
| | Jumlah | Rp. 4.574.289.000 | Rp. 1.987.386.000 |

5.3.2. Belanja

5.3.2.1 Beban Operasi

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

| No. | Uraian | 2014 |
|-----|------------------------|-----------------------|
| I. | Belanja Tidak Langsung | 26.485.189.533 |
| II. | Belanja Langsung | 6.035.064.600 |
| | Jumlah | 32.520.254.133 |

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

| No. | Uraian | 2014 |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | Beban Persediaan | 3.453.647.241,00 |
| 2. | Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas | 12.310.534.628,00 |
| 3. | Beban Penyusutan | 1.094.561.577,36 |
| 4. | Beban Piutang Tak Tertagih | 0 |
| 5. | Beban Lain-Lain | 911.756.750,00 |
| | Jumlah | 17.770.500.196,36 |

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5.4.1. Laporan Perubahan Ekuitas

| (dalam rupiah) | | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|
| NO | URAIAN | 2014 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | EKUITAS AWAL | 17.796.444.419,00 | |
| 2 | SURPLUS/DEFISIT LO | 69.431.246,64 | |
| | SURPLUS/DEFISIT LO | (45.716.465.329,36) | |
| | RK PPKD | 45.785.896.576,00 | |
| | KAS BENDAHARA | - | |
| 3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | (3.785.099.232,80) | |
| | KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG | | |
| | KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG TIDAK TERTAGIH | | |
| | KOREKSI/PENYESUAIAN PERSEDIAAN | | |
| | KOREKSI/PENYESUAIAN INVESTASI NON PERMANEN | | |
| | KOREKSI/PENYESUAIAN ASET TETAP | 11.275.000 | |
| | KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET TETAP | (3.796.374.232,80) | |
| | KOREKSI/PENYESUAIAN ASET LAINNYA | | |
| 4 | EKUITAS AKHIR | 14.080.776.432,84 | 17.796.444.419,00 |

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum

Secara historis Badan Kepegawaian Daerah lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Selanjutnya nama lembaga Badan Kepegawaian Daerah sendiri mulai di sebut untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 34A yang menegaskan :”Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah”.

Berdasar Ketentuan Tersebut diatas maka untuk pembentukan lembaga Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempatkan fungsi manajemen kepegawaian yang semula dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian pada Sekretariat Daerah, dialihkan kepada lembaga tersendiri yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian, yaitu Badan Kepegawaian Daerah.

Oleh karena itu pada tahun 2001 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 *tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pemb Lintas Kab/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Badan Kepegawaiaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27)* dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu lembaga perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menempati kantor di Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang.

Sehubungan adanya PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 dirubah Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai lembaga baru yang lahir di era reformasi, Badan Kepegawaian Daerah dengan mengemban amanat sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah, mulai menata diri dengan melakukan penataan dari segi sistem, personil maupun pelayanannya.

Guna memantapkan eksistensi dan arah perjuangan dalam mengemban amanat tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi yaitu **“Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Unggul ”** sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap personil Badan Kepegawaian Daerah dalam bekerja selalu mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang dilayani sesuai tugas tanggung jawab masing-masing dan bahwa tugas yang diemban tersebut merupakan amanah yang wajib dijalankan secara profesional, sehingga dapat terwujud PNS yang Profesional, Bermoral, Netral sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya untuk mewujudkan visinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan misi yang selanjutnya dijabarkan dalam program-program kegiatan setiap tahunnya. Dalam mengemban misinya dan pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya Badan Kepegawaian Daerah berusaha memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dan komputer dengan mendayagunakan serta meningkatkan kemampuan personilnya. Hasilnya telah terwujud beberapa program aplikasi komputer untuk pengelolaan data dan penyelesaian administrasi kepegawaian.

Di samping itu sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, telah dikembangkan beberapa program kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan kualitas manajemen kepegawaian.

6.2 Penyelenggaraan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sejak Berdirinya hingga sekarang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh:

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----|-----------------|
| 1. Widadi, SH | 30 Juni 2001 | s/d | 4 Maret 2006 |
| 2. Drs Agus Setianto | 4 Maret 2006 | s/d | 31 Agustus 2011 |
| 3. Suko Mardiono, SH, MM | 9 September 2011 | s/d | Sekarang |

6.3 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

6.3.1 Misi

Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Daerah Yang Profesional dan Unggul

6.3.2 Misi

1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan.
2. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur.
3. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja.
4. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai.
5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi.
6. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian.

6.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) :

Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah sebagai unsur pendukung tugas Gubernur dibidang kepegawaian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian.

6.4.1 Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai fungsi:

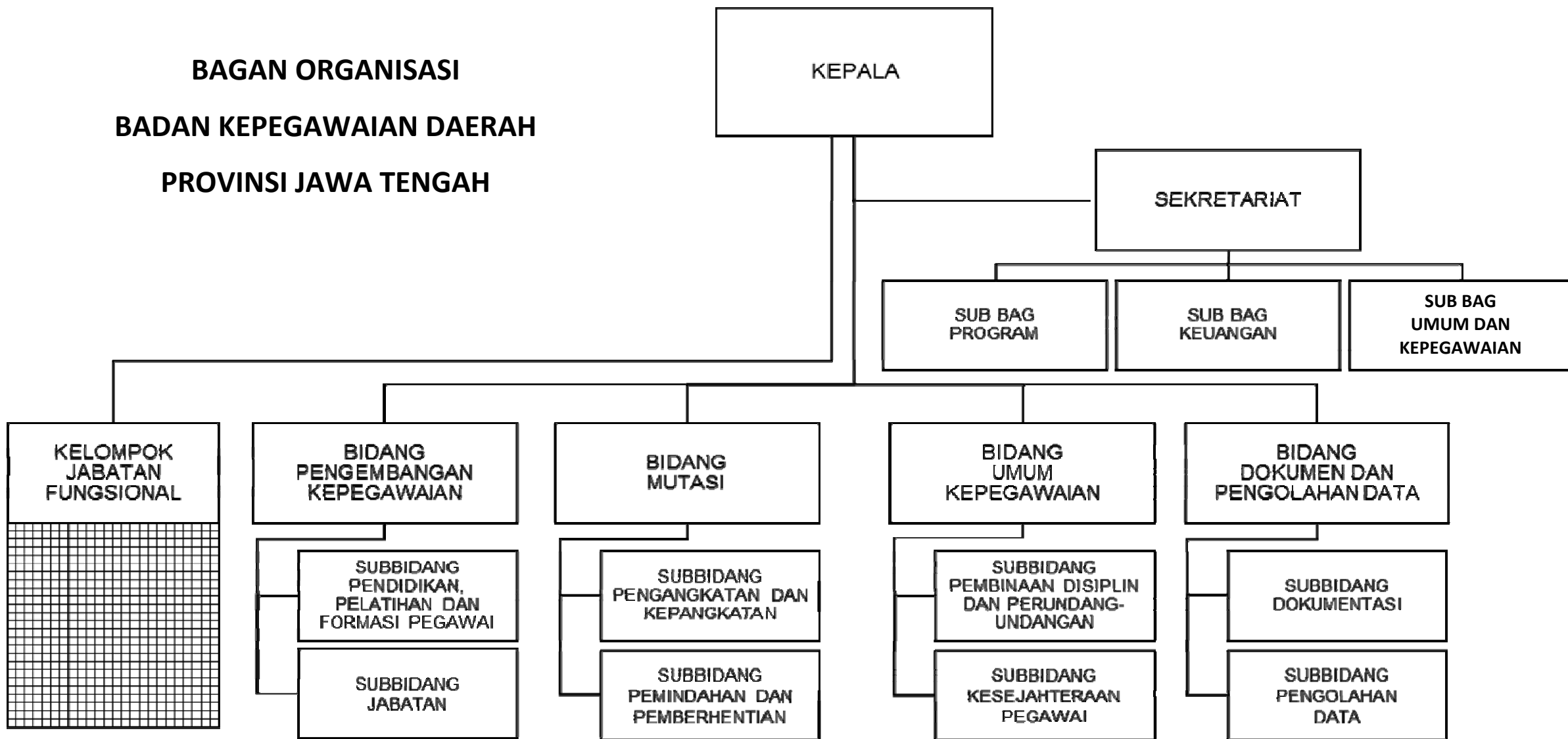
1. Perumusan kebijakan teknis dbidang kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, Umum Kepegawaian, dokumen dan pengolahan data Pegawai Negeri sipil lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian;
5. Pelaksanaan Kesekretariatan badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6.5 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang membawahi tiga sub bagian, dan empat Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi masing-masing dua Sub Bidang.

Adapun gambar struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 ini kami susun untuk dapat memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahannya yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di tahun yang akan datang, sekaligus sebagai pertanggung jawaban Pengguna Anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah.